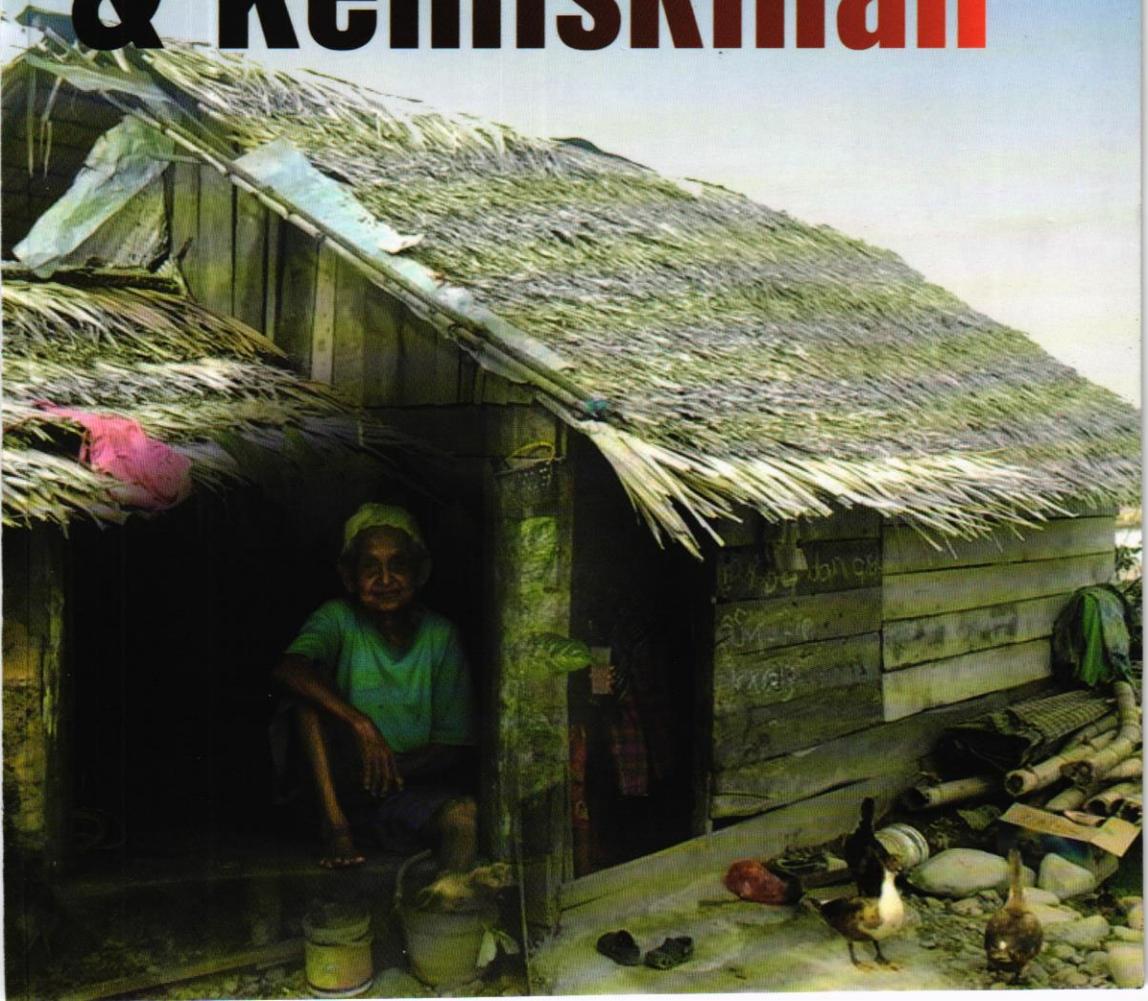


Editor:
Mutiullah dan Moch Nur Ichwan

Agama, Filsafat, & Kemiskinan



Editor:
Mutiullah dan Moch Nur Ichwan

Agama, Filsafat, & Kemiskinan

Agama Filsafat & Kemiskinan

Perpustakaan Nasional:

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mutiullah dan Moch Nur Ichwan (ed.)

Agama, Filasafat, dan Kemiskinan, Editor: Mutiullah dan Moch Nur Ichwan, — cet. 1. — Yogyakarta: Program Studi Agama dan Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
xii + 252 hlm, 16 cm x 24 cm
ISBN: 978 - 6027 - 2084 - 3 - 8

I. Antologi

2. **Agama, Filasafat, dan Kemiskinan**

I. Judul

II. Mutiullah dan Moch Nur Ichwan (ed.)

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang

Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa seijin penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum

Agama, Filasafat, dan Kemiskinan

Editor: Mutiullah dan Moch Nur Ichwan

Penulis:

Moch Nur Ichwan - Mutiullah - Alim Roswanto
Martino Sardi - Benny Baskara - Muhammad Arif
Musahadi - Ishak Hariyanto - Mahathir Muhammad Iqbal
Benny Afwadzi - Muhammad Barir - Mu'ammam Zayn Qadafy

Cetakan I: Maret 2015

Diterbitkan oleh:

Program Studi Agama dan Filsafat
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp. 0274 519709, Faks. 0274 557978
Website <http://pps.uin-suka.ac.id>
E-Mail: pps@uin-suka.ac.id

KATA PENGANTAR

Program Studi Agama dan Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kali ini mengangkat tema agama, filsafat dan kemiskinan, atau tepatnya tanggung jawab agama dan filsafat dalam pengentasan kemiskinan. Buku ini menyuguhkan pembahasan yang kompleks, mulai dari aspek normatif agama, filsafat sampai rekomendasi praksis untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Buku ini menghadirkan kajian agama dan filsafat yang “garang” terhadap fenomena kemiskinan. Bahasan dalam buku ini adalah anti-tesis terhadap kajian agama yang lemah menghadapi kemiskinan dan filsafat yang terlalu abstrak mendekati kemiskinan. Kajian-kajian dalam buku ini berdimensi liberatif dan progresif dalam berhadapan dengan fakta kemiskinan, dan mencoba menjawabnya dari perspektif agama dan filsafat.

Buku ini dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang hubungan antara Agama dan Kemiskinan. Bagian ini dimulai dari tulisan Musahadi yang menjelaskan tentang fakta kemiskinan yang tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan. Munculnya wilayah rawan pangan, beragam peristiwa kelaparan di berbagai daerah, semakin membeludaknya para pencari kerja, hingga keluhan-keluhan merosotnya daya beli masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga barang kebutuhan tampaknya menjadi teman dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini merelease ulang Laporan Pembangunan Manusia atau *Human*

Development Report (HDR) pada tahun 2013 yang menempatkan Indonesia berada dalam posisi 108 dari 187 negara dengan nilai 0,684. HDI sendiri mengukur tentang tiga hal pokok yaitu harapan hidup, akses terhadap ilmu pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, Indonesia masih kalah dari Singapura (18), Malaysia (64) dan Thailand (103). Artikel ini memberi rekomendasi kepada pemangku kebijakan negara agar mampu memetakan secara tepat dan mengambil kebijakan yang tepat pula mengenai akar kemiskinan yang menjadikan buruknya indeks pembangunan manusia.

Martino Sardi meniscayakan tanggung jawab agama-agama, khususnya para pemimpin agama-agama, yang ada di Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam memerangi dan mengentaskan kemiskinan. Agama-agama yang ada di Indonesia memang sudah ikut serta dalam pembangunan di negara ini, namun peranan yang nyata dalam perjuangan memerangi kemiskinan ini menurutnya masih belum seberapa. Faktanya, agama-agama hanya sibuk mempersoalkan bidang ibadah, ajaran, doktrin atau teologi yang jauh dari realitas kemiskinan sosial, politis dan ekonomis ini. Sikap yang demikian ini sungguh sangat disayangkan, seharusnya, agama-agama mengeluarkan seluruh tenaga dan energi untuk memerangi kemiskinan di Indonesia secara sistematis dan profesional, sehingga rakyat Indonesia akan semakin sejahtera dan kemiskinan semakin dikikis habis.

Ishak Hariyanto menyoroti secara kritis fakta kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara terstruktur oleh agama dan filsafat, akan tetapi keduanya hanya mampu memberikan horizon pengetahuan serta solusi pemikiran untuk meminimalisasi problematika kemiskinan tersebut. Artikel ini menegaskan bahwa sesungguhnya agama hanyanya sebatas bayang-bayang dalam menyelesaikan problematika kemiskinan, karena hanya memberikan sebatas ketenangan sesaat dan hanya sebagai mengisi kekosongan hidup, dan bahkan cenderung agama dijadikan sebagai sikap apologetik, yakni sebagai tempat menghibur suara hati yang dilanda kemiskinan. Agama hanya sebatas ritual yang hanya

mampu memberikan suntikan rasa nyaman (menghilangkan rasa sakit sementara) kepada para pemeluknya.

Bagian kedua menjelaskan tentang pandangan filsafat tentang Kemiskinan. Bagian ini diawali oleh tulisan Mutiullah tentang kemiskinan dari perspektif teori keadilan John Rawls. Artikel ini menjabarkan tentang lima problem sosial-ekonomi paling mengerikan yang menjadi sumber ketidaksetaraan di masyarakat dan mengancam masa depan generasi masa depan, yakni ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, kondisi kesehatan balita dan angka putus sekolah. Artikel ini, mengajukan tiga solusi praktis untuk mengatasi kemiskinan, yakni perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan, pembukaan lapangan kerja untuk rakyat miskin, dan pembangunan sistem jaring pengaman sosial.

Bagaimana Richard Rorty memandang kemiskinan menjadi perhatian Alim Roswanto. Tulisan ini mencoba mendiskripsikan bahwa kemiskinan tidak cukup diatasi dengan pikiran-pikiran objektif dari politik sebagai strateginya. Kemiskinan tidak cukup pula diatasi dengan penawaran teori-teori ideal ekonomi-politis, seperti sosialisme, kapitalisme, sosialisme-religius, kapitalisme-religius, utilitarianisme, komunitarianisme, dan persamaan-liberal. Berpijak kepada pemikiran Richard Rorty, kemiskinan dilihat sebagai kenyataan yang kebetulan ada di tengah-tengah kita, yang membangkitkan rasa keprihatinan jiwa kita. Kita tidak perlu cara-cara objektif dan sistematis untuk mengatasinya, kita hanya perlu solider dengan cara-cara kita masing-masing secara unik, apakah itu secara individual maupun kolektif.

Benny Baskara berupaya mencari jawaban tentang kemiskinan dari pemikiran-pemikiran Karl Marx, Max Weber, dan Hassan Hanafi. Walau terdapat "kelangkaan" filsafat dalam membahas kemiskinan, masih ada sejumlah tokoh yang menyinggung masalah kemiskinan dalam pemikirannya, di antaranya ketiga filosof di atas. Di samping menyinggung masalah kemiskinan, pemikiran ketiga tokoh tersebut juga menghubungkan antara masalah kemiskinan dengan agama. Hassan Hanafi membahas Islam dan kemiskinan dalam pemikirannya, Max Weber membahas Kristen, khususnya Protestan, dan kemiskinan,

sedangkan Karl Marx justru menjelaskan hubungan antagonis antara agama dan kemiskinan.

Dalam artikelnya tentang kritisisme Immanuel Kant, teologi Islam dan kemiskinan, Muhammad Arif menjelaskan bahwa problem kemiskinan itu tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan ekonomis dan politis. Dalam menyikapi persoalan kemiskinan, sisi religiositas masyarakat merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan. Dimensi keagamaan memiliki peran penting dalam laku keseharian manusia Indonesia, tapi teologi Islam yang diajarkan di Indonesia pada umumnya adalah teologi dalam bentuk ilmu tauhid yang biasanya cenderung jauh dari persoalan kemiskinan. Bahasan yang termaktub di dalamnya biasanya tidak lepas dari persoalan tentang ketuhanan dan perkembangan tradisi dan aliran ilmu kalam pada masa Islam klasik. Artikel ini berusaha menawarkan teologi Islam yang dapat menjadi alat pengentasan kemiskinan.

Bagian ketiga menjelaskan tentang Islam, Spiritualitas dan Kemiskinan. Mengawali bagian ini, Mahathir Muhammad Iqbal mengajukan pemikiran tentang "keberislaman yang Pro-Poor", berpihak kepada masyarakat miskin. Problem kemiskinan yang dialami sebagian umat manusia, menurutnya, tidak lain disebabkan karena problem distribusi, di mana sebagian orang mengambil atau mendapatkan terlalu banyak, sebagian manusia yang lain tidak kebagian apa yang menjadi haknya. Inilah yang disebut ketidakadilan. Dia menjelaskan pesan suci al-Quran yang menjadikan kepedulian kepada orang-orang lemah sebagai parameter otentik keberagamaan. Dia menghimbau para ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa jihad melawan korupsi-manipulasi dan mafia birokrasi yang menjadi sumber utama kemiskinan di Indonesia.

Benny Afwadzi mencoba menelisik problem kemiskinan ini dari pesan profetik dalam sejumlah hadits Nabi Muhammad. Benny berusaha menyajikan pembacaan berbeda yang barangkali belum terbaca sebagai landasan berpikir mengenai kemiskinan dalam perpektif hadis. Artikel ini berupaya menemukan pesan profetik dalam hadis Nabi karena banyak hadis mengajarkan kepada

orang Islam agar mengutamakan aksi untuk penanggulangan kemiskinan di atas segalanya. Pengentasan kemiskinan harusnya menjadi prioritas utama studi Islam di era kontemporer. Umat Islam pada era sekarang seyogyanya tidak terjebak lagi dengan perdebatan seputar hukum yang menguras keringat, tanpa memperhatikan kondisi kemiskinan di sekitarnya. Atau dengan kata lain, peradaban Islam yang sebelumnya disibukkan dengan kajian hukum, kini saatnya mulai berbenah dengan kajian lain, yaitu memulai langkah-langkah yang bisa meningkatkan taraf hidup golongan fakir dan miskin yang selama ini selalu hidup dengan ketertindasan.

Muhammad Barir dan Mu'ammarr Zayn Qadafy sama-sama mengangkat tema asketisme, walau dengan pemahaman yang agak berbeda. Barir menjelaskan bahwa Islam memiliki ajaran tentang kesadaran asketik yang unik sebagaimana yang tercermin dari sosok Muhammad SAW. Barir berusaha menonjolkan dua sisi Islam, yakni sisi Islam sebagai agama yang mengajarkan nilai sufistik kesederhanaan dan juga Islam sebagai agama yang visioner dalam membangun etos kerja kepada masyarakatnya. Dia ingin membangunkan kesadaran umat Islam yang sebelumnya hanya menilai Islam dari sisi yang pertama dan melewati sisi kedua. Artikel ini ingin menampilkan kedua sisi Islam secara bersamaan yang diharapkan menjadi penyeimbang kemanusiaan yang revolusioner.

Sedangkan Mu'ammarr Zayn Qadafy menjelaskan konsep *zuhd* aktif, yang disebutnya *asketisme progresif*, yang harus dikembangkan dalam masyarakat untuk menyadarkan bahwa "mencari dunia" bukanlah sesuatu yang berlawanan dengan Islam. *Zuhd* bukanlah sikap pasif seseorang yang pasrah dengan "bagian dunia" yang memang tidak ia usahakan. *Zuhd* bukanlah "asketisme" semata, karena pelaku asketisme dengan sengaja meninggalkan dunia. Sedangkan pelaku *zuhd* tetap mencari kehidupan dunia namun tidak terobsesi terhadapnya. *Zuhd* menurutnya adalah mentalitas hati untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Dengan demikian, pelaku *zuhd* bersikap aktif dan senantiasa berpikiran positif terhadap dunia, tidak malah pasrah dan bersikap apatis terhadapnya.

Bagian ini, dan juga buku ini, ditutup oleh artikel Moch Nur Ichwan yang menjelaskan bagaimana Islam mempunyai perspektif liberatif yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan orang-orang miskin, dan bagaimana persepektif liberatif itu terinstitusionalisasi dalam aktivisme humanitarian. Dia berupaya merunut munculnya “Teologi Pemiskinan” dan kemudian menunjukkan kelemahan argumentasinya. Islam tidak memerintahkan ummatnya untuk hidup miskin. Bahkan sebaliknya, sejumlah praktik keagamaan mensyaratkan adanya beaya, dari yang kecil sampai yang besar, seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, haji. Belum lagi untuk shalat diperlukan pembangunan mushalla dan masjid; untuk mendidik ummat diperlukan lembaga pendidikan; untuk menjaga kesehatan masyarakat diperlukan rumah sakit dan obat-obatan—dan seterusnya. Sejumlah hukuman juga mensyaratkan itu, seperti memberi makan sejumlah orang miskin dan membebaskan budak (masa kini pun ternyata perbudakan dan *human trafficking* masih banyak terjadi). Tidak ada teks-teks suci keagamaan yang secara eksplisit memerintahkan kehidupan miskin, walau ada sejumlah teks yang memerintahkan hidup sederhana, tidak berlebihan, dan menjadikan harta sebagai cobaan (*fitnah*). Bahkan ada teks-teks yang melarang hidup malas dan menggantungkan diri kepada belas kasihan orang lain, dan teks-teks yang menghargai kerja dan usaha keras. Nilai-nilai dan doktrin-doktrin Islam meniscayakan suatu bentuk aktivisme progresif untuk membebaskan orang-orang yang lemah, terlemahkan, miskin dan tersisih.

Moga buku ini dapat memberikan sumbangan positif terhadap wacana dan praktik pengentasan kemiskinan dari perspektif agama, terutama Islam, dan filsafat yang membebaskan dan mencerahkan. Selamat membaca!

Yogyakarta, November 2014

Mutiullah & Moch Nur Ichwan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	xi

BAGIAN I: AGAMA DAN KEMISKINAN

- KEMISKINAN DI NEGERI MAKMUR: AKAR, KEBIJAKAN, DAN TANTANGAN
Oleh: **Musahadi** 3
- AGAMA, KEMISKINAN DAN PERDAMAIAN
Oleh: **Martino Sardi** 23
- AGAMA SEBAGAI BAYANG-BAYANG SOLUSI KEMISKINAN
Oleh: **Ishak Hariyanto** 37

BAGIAN II: FILSAFAT DAN KEMISKINAN

- AGENDA BUMI HANGUS KEMISKINAN DALAM BINGKAI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
Oleh: **Mutiullah** 57
- RICHARD RORTY DAN KEMISKINANPOLITIK DALAM ISLAM
Oleh: **Alim Roswanto**. 77

- KRITISISME KANT, TEOLOGI ISLAM DAN KEMISKINAN
Oleh: **Muhammad Arif** 107
- APA KATA FILSAFAT TENTANG KEMISKINAN? MENDAKI
PUNCAK PEMIKIRAN KARL MARX, MAX WEBER, DAN HASSAN
HANAFI
Oleh: **Benny Baskara** 125

BAGIAN III: ISLAM, SPIRITUALITAS DAN KEMISKINAN

- MEMBANGUN KEBERISLAMAN PRO POOR
Oleh: **Mahathir Muhammad Iqbal** 151
- KEMISKINAN DAN PESAN PROFETIK: UPAYA MENGGALI PESAN
TERSIRAT DALAM HADIS NABI
Oleh: **Benny Afwadzi** 167
- KESADARAN ASKETIS DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Oleh: **Muhammad Barir** 189
- PARADIGMA ASKETISME PROGRESIF DAN MEDAN PERANG
KEMISKINAN
Oleh: **Mu'ammarr Zayn Qadafy** 207
- ISLAM, KEMISKINAN DAN AKTIVISME SOSIAL KRITIS
Oleh: **Moch Nur Ichwan** 223
- BIODATA PENULIS 245

**BAGIAN I:
AGAMA DAN
KEMISKINAN**



Musahadi

KEMISKINAN DI NEGERI MAKMUR :

AKAR, KEBIJAKAN, DAN TANTANGAN

Pada tahun 1968 Gunnar Myrdal menulis karya ambisius yang berjudul *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*. Myrdal (1898-1987) adalah penerima Nobel Ekonomi 1974 bersama dengan Friedrich Hayek (1899-1992). *Asian Drama* menyediakan analisa dan kesimpulan mengenai pembangunan ekonomi dan politik kemiskinan di Asia Selatan dalam 3 volume buku dengan total 2284 halaman.¹ Menurut Myrdal, kemiskinan di Asia bukan semata-mata disebabkan oleh problem ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh latar belakang demografi, sosial dan politik. Negara-negara seperti Pakistan, India, Burma, Thailand dan tentu Indonesia terus mengalami modernisasi tetapi keengganan para pemimpinnya untuk keluar dari persoalan yang sesungguhnya

¹Buku Gunnar Myrdal yang sebanyak tiga volume ini diringkas dengan sangat baik oleh Seth. S. King. (Great Britain: Allen Lane The Penguin Press, 1977), Hlm. 3.

mereka sadari, seperti kemiskinan, membuat negara-negara ini terus mengalami tragedi yang berkepanjangan.

Hingga hari ini, kemiskinan tetap menjadi problem serius bagi berbagai pemerintahan di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Hampir satu dekade lalu, pada 2005, kejadian busung lapar terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini mengundang keprihatinan banyak pihak dan pemerintah menetakannya sebagai kejadian luar biasa (KLB).² Di Yahukimo, Papua, juga terjadi bencana yang sama. Ironi ini terjadi di tengah asumsi besar yang terus menerus dibangun bahwa Indonesia adalah negara kaya raya dengan sumber alam yang melimpah.

Berbagai kritik terus dilancarkan selama beberapa periode pemerintahan di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi pergantian kepala negara, dari Sukarno hingga SBY, persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan. Munculnya wilayah rawan pangan, beragam peristiwa kelaparan di berbagai daerah, semakin membeludaknya para pencari kerja, hingga keluhan-keluhan merosotnya daya beli masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga barang kebutuhan tampaknya menjadi teman dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam laporan terbaru Badan Pusat statistik hingga Maret 2014, ada sebanyak 28.280.000 jiwa yang masuk dalam kategori penduduk miskin di Indonesia. Jumlah itu 11,25 persen dari seluruh jumlah penduduk seluruh Indonesia baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan.³ Prosentase jumlah ini tercatat mengalami perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya (per Maret), yaitu 12,49% (2011), 11,96% (2012), dan 11,37% (2013), meskipun tidak secara signifikan.⁴ Dalam hal ini, pemerintah Indonesia perlu bekerja lebih giat untuk menyelesaikan persoalan, karena kemiskinan memiliki implikasi yang beruntun (*multiple effect*),

²Kompas, 28 Mei 2005.

³http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=7, akses 13 Oktober 2014.

⁴http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=7, akses 13 Oktober 2014.

selain berdampak pada kelaparan, kemiskinan juga berdampak pada derajat kesehatan, kesejahteraan, kualitas pendidikan dan ujungnya pada kualitas SDM serta daya saing bangsa.

Laporan Pembangunan Manusia atau *Human Development Report* (HDR) pada tahun 2013 menempatkan Indonesia berada dalam posisi 108 dari 187 negara dengan nilai 0,684. HDI sendiri mengukur tentang tiga hal pokok yaitu harapan hidup, akses terhadap ilmu pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, Indonesia masih kalah dari Singapura (18), Malaysia (64) dan Thailand (103). Kualitas ini mengisyaratkan agar negara mampu memetakan secara tepat mengenai akar kemiskinan, yang menjadikan buruknya indeks pembangunan manusia, untuk mengambil kebijakan yang tepat pula.

A. Kemiskinan: Masalah Definisi

Sebagai sebuah realitas, kemiskinan adalah sesuatu yang kompleks. Ada kemiskinan yang bersifat aksidental atau perorangan, seperti karena sikap mental atau cacat fisik. Ada juga berupa kemiskinan struktural karena eksploitasi dalam pola hubungan yang tidak adil dan menindas dari suatu kelompok atau seseorang pada kelompok lain yang kadang muncul pada bentuk kemiskinan massal dalam skala massif.⁵ Kemiskinan, oleh Rudolf S. Sinaga dan Benyamin White dibagi dalam dua kategori. *Pertama*, kemiskinan alamiah (*natural poverty*), yakni yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. *Kedua*, kemiskinan buatan (*artificial poverty*), yaitu kemiskinan yang disebabkan kelembagaan-kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.⁶

⁵Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan: Refleksi atas Pandangan Islam dan Kristen dalam Perspektif Kerjasama antar Umat Beragama*, (Jakarta: Logos 1999), hlm.5

⁶Rudolf S. Sinaga dan Benyamin White, "Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Struktural" dalam

Merumuskan suatu definisi tentang kemiskinan, tampaknya bukanlah suatu hal yang mudah, karena selain kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, juga karena masing-masing pembuat definisi sangat dipengaruhi oleh latar belakang kerangka pemikiran dan fokus perhatiannya dalam melihat masalah kemiskinan.⁷ Dalam Ensiklopedia Ilmu Ekonomi, kemiskinan didefinisikan sebagai “kondisi kekurangan materi yang biasanya dipahami sebagai kekurangan pemasukan uang yang berkaitan dengan standar kemiskinan”.⁸

Dalam formulasi yang agak panjang, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai seorang yang: “hidup tanpa kebebasan berperilaku dan kebebasan memilih yang sangat mendasar untuk dapat hidup lebih baik. Mereka bahkan kekurangan papan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dan kekurangan segalanya menghalangi mereka untuk meraih kehidupan yang berharga dan berarti. Mereka juga mesti menghadapi ancaman yang sangat mudah terserang wabah penyakit, dislokasi ekonomi dan bahaya bencana alam. Mereka juga sering menghadapi perlakuan yang tidak adil dari berbagai institusi negara dan masyarakat serta tidak berdaya untuk ikut mempengaruhi keputusan penting yang mempunyai dampak langsung dalam kehidupan mereka”.⁹

Suatu definisi yang mencoba membuat ukuran batas minimal standar tingkat kehidupan diajukan oleh Parsudi Suparlan. Menurutnya, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah; yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku

Alfian, et.al. (Ed.), *Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980), hlm. 142-143.

⁷Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan...*, hlm. 11.

⁸Amer Al-Roubaie, “Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif” dalam *Islamia*, Vol II No. 3, Desember 2005, hlm. 81.

⁹Amer Al-Roubaie, “Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif”, hlm.81.

dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰ Sejalan dengan Parsudi, Nabil Subhi Ath-Thawil mendefinisikan kemiskinan sebagai “tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan itu dianggap pokok, karena ia menyediakan batas kecukupan minimum untuk hidup manusia yang laik dengan tingkatan kemuliaan yang dilimpahkan Allah atas dirinya.”¹¹

Beranjak dari titik tekan yang sama, Frans Magnis Suseno berkesimpulan bahwa kemiskinan menunjuk pada makna “orang yang tidak menguasai sarana-sarana fisik secukupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, untuk mencapai tingkat minimum kehidupan yang masih dapat dinilai manusiawi”.¹² Neils Mulder juga membuat definisi tentang kemiskinan, yakni “yang tidak sampai pada suatu tingkat kehidupan yang minimal seperti ditunjukkan oleh garis kemiskinan yang mengungkapkan taraf minimal untuk bisa hidup dengan cukup dan wajar”. Meskipun mengajukan rumusan definisi tersebut, namun Mulder mengakui bahwa konsep mengenai garis kemiskinan tersebut sukar didefinisikan.¹³

Definisi-definisi ini memberi tekanan pada tingkat pemenuhan kebutuhan pokok yang minimal untuk dapat hidup secara layak atau manusiawi. Konsep ini masih bersifat terbuka untuk di-break down, terutama mengenai tingkat ukuran kebutuhan dasar dan tingkat kehidupan yang layak atau manusiawi itu. Berbagai definisi tentang kemiskinan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kemiskinan pada dasarnya menunjuk makna ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) untuk suatu tingkat kehidupan yang layak menurut ukuran yang umum berlaku pada masyarakat tertentu pada suatu konteks tempat tertentu.

¹⁰Parsudi Suparlan (Ed.), *Kemiskinan di Perkotaan*, Sinar Harapan: Jakarta, 1984, h. 12.

¹¹Nabil Subhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, Trj. Muhammad Bagir, (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 36.

¹²Frans Magnis Suseno, SJ. “Keadilan dan Analisis Sosial: Segi-segi Etis” dalam J.B. Banawiratman, SJ. (Ed.) *Kemiskinan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 37.

¹³Neils Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984), hlm. 76.

Dalam ilmu-ilmu sosial, untuk menentukan batas kemiskinan dipergunakan tolok ukur yang berbeda-beda. Masing-masing bertolak dari fokus perhatian dan sudut permasalahan yang menjadi objek kajiannya. Ada yang mengukur dengan *incom per-capita* atau pendapatan rata-rata perkepala. Badan Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan bahwa suatu masyarakat yang pendapatannya rata-rata perorang kurang dari US\$ 300 setahun digolongkan sebagai masyarakat yang miskin.¹⁴ Selain menggunakan tolok ukur pendapatan perkapita, ada tolok ukur lain untuk menentukan kemiskinan, yaitu melalui gizi. Apabila jumlah protein dan kalori seseorang atau masyarakat kurang dari jumlah tertentu maka dapat digolongkan sebagai masyarakat yang miskin. Sayogjo memberikan tolok ukur untuk menentukan garis kemiskinan berdasarkan atas batas minimal jumlah kalori yang dikonsumsi per-orang yang diambil persamaannya dalam beras. Sayogjo membagi tingkat kemiskinan menjadi tiga tingkatan, miskin, miskin sekali, dan paling miskin sebagaimana terlihat dalam tabel berikut¹⁵:

Tabel: 1
Klasifikasi Tingkat Kemiskinan

No	Klasifikasi tingkat kemiskinan	Tingkat konsumsi (beras) perkapita pertahun		Nilai rupiah (ribuan) Rp 150,-/ kg.beras
		Desa	Kota	
1	Miskin	320 kg	480 kg	48-72
2	Miskin sekali	240 kg	360 kg	36-54
3	Paling miskin	180 kg	270 kg	27-40

Ada juga yang lebih tertarik mengukurnya dengan tingkat rata-rata kematian (*death rate*). Masyarakat dikatakan miskin, jika rata-rata angka kematiannya cukup tinggi. Hal ini bertolak dari anggapan bahwa jika banyak orang yang meninggal, kemungkinan mereka kurang makan.¹⁶ Beragamnya definisi itu memberikan

¹⁴Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan...*, h. 16.

¹⁵Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan...*, h. 17.

¹⁶Selo Sumardjan, "Kemiskinan Struktural dan Pembangunan" dalam

bukti bahwa ukuran baku mengenai kemiskinan sulit untuk ditentukan dan mencapai definisi yang final.

B. Akar-Akar Kemiskinan

Banyak teori dikemukakan mengenai akar penyebab kemiskinan. Salah satunya adalah teori yang mengaitkan kemiskinan dengan kondisi alam. Menurut teori ini, suatu komunitas atau bangsa terjatuh pada kemiskinan karena keadaan alamnya yang kurang subur, seperti tanahnya berbatu-batu, kering, tidak cukup luas, tidak mengandung mineral atau kekayaan alam lainnya sehingga tidak mempunyai potensi untuk dikembangkan. Akan tetapi, dengan melihat pada kasus Jepang, Belanda, Singapura dan Taiwan segera saja kita bisa menolak teori ini, mengingat negara-negara tersebut ditakdirkan Tuhan tidak memiliki kondisi alam yang subur dan potensial tetapi bisa menjadi negara makmur¹⁷. Sementara Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah tak mampu beranjak dari kemiskinan.

Teori lain meyakini bahwa kemiskinan berhubungan dengan "sikap mental atau budaya". Seseorang atau masyarakat jatuh miskin karena tidak memiliki sikap mental yang positif untuk membangun; seperti tidak memiliki sikap wiraswasta, apatis, pasrah, tidak percaya diri dan sebagainya.¹⁸ Terkait dengan mentalitas dan budaya ini, agama juga disebut-sebut sebagai memiliki andil dalam kemiskinan. Agama beserta sistem budaya yang diusung terkadang mengarahkan pengikutnya pada sikap fatalis dan menerima kemiskinan sebagai suatu takdir dan mendapat tempat terhormat untuk mendekatkan diri pada Tuhan bagi kesempurnaan diri. Ekspresi doktrin agama yang fatalistik seperti ini tentu dapat dibaca memiliki kaitan dengan kemiskinan. Keyakinan itu menjadikan sebagian pemeluk agama menerima kemiskinan dengan segala resiko dan tanpa usaha untuk memperbaikinya.

Alfian, et.al. (Ed.), *Kemiskinan Struktural*, (Jakarta, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980), hlm. 2.

¹⁷John Kenneth Galbraith, *Hakikat Kemiskinan Massa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 12.

¹⁸Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan...*, h. 23-24.

Secara lebih spesifik dan berwatak psikologis, David C. McClelland melontarkan gagasan bahwa penyebab suatu bangsa tidak maju dan miskin adalah karena tidak memiliki : "virus *n Ach*" (*need for Achievement*) yaitu kebutuhan untuk meraih hasil atau prestasi. McClelland mengidentifikasi *n Ach* ini sebagai semacam virus mental yang apabila terjadi pada diri seseorang, cenderung akan menyebabkan orang itu bertingkah laku secara giat.¹⁹ Teori lain yang berperspektif sosiologis mengajukan masalah ledakan penduduk sebagai salah satu variabel yang bertanggung jawab bagi merebaknya kemiskinan. Tokoh penting yang mengusung pendapat ini adalah Malthus yang sejak tahun 1798 telah sampai pada kesimpulan bahwa kesentosaan manusia senantiasa diganggu oleh kenyataan pertambahan manusia yang lebih cepat dari pada pertambahan bahan makanan. Manusia pada kenyataannya berkembang biak menurut "deret ukur" sementara bahan makanan berkembang menurut "deret hitung". Teori ini sekaligus mengajukan konsep mengenai penanggulangan masalah kemiskinan, yakni melalui penurunan angka kelahiran dengan pemakaian alat kontrasepsi yang di Indonesia dikenal dengan program "Keluarga Berencana".²⁰

Teori ini dibantah oleh Susan George dalam *How the Other Half Dies; The Real Reasons for world Hunger*. Susan mengatakan bahwa kemiskinan atau lebih tepatnya kelaparan tidak ada hubungannya dengan kelebihan penduduk. Susan berpijak pada fakta empiris bahwa kelaparan terjadi di Bolivia dengan kepadatan penduduk lima orang perkilometer persegi, di India dengan kepadatan 172 orang, tetapi tidak terjadi di Negeri Belanda dengan kepadatan 326 orang perkilometer persegi.²¹ Selain yang telah disebutkan, masih terdapat sederet sebab lain yang dianggap memiliki saham bagi timbulnya kemiskinan, yakni: pendidikan, kekurangan

¹⁹David C. McClelland, "Dorongan Hati Menuju Modernisasi", dalam Myron Weiner (Ed.), *Modernisasi, Dinamika, Pertumbuhan*, (Jakarta: Gajah Mada University Press, 1980), hlm. 2.

²⁰Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan...*, h. 25-26.

²¹Lihat Jalaluddin Rahmat, "Kunci Surga yang Terbuang" dalam Nabil Subhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, Trj. Muhammad Bagir, (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 12.

gizi, dan pola asuh dalam keluarga. Pendapat yang lebih progresif menyatakan bahwa dalam banyak kasus, kemiskinan sesungguhnya lebih dikarenakan kesalahan dalam sistem ekonomi yang dikembangkan suatu negara dalam proses pembangunan atau modernisasi beserta sistem politik dan ideologinya.

Secara lebih eksplisit, kemiskinan seringkali merupakan hasil dari salah urus (*miss-management*) atas berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh sebuah negara. Kemiskinan muncul karena adanya struktur sosial yang eksploitatif dan relasi *in-justice* pada institusi-institusi ekonomi, politik, agama, budaya, keluarga dan sebagainya. Itulah sebabnya, kemiskinan yang timbul dalam suatu masyarakat, demikian tegas Dawam Rahardjo, jangan dibaca semata-mata sebagai akibat dari faktor-faktor yang terdapat pada dirinya sendiri, seperti rendahnya pendidikan dan kurangnya kalori, akan tetapi harus dibaca sebagai akibat dari eksploitasi.²²

Sedemikian banyaknya pandangan mengenai penyebab kemiskinan dan bagaimana cara mengatasinya. Semua bergantung pada ideologi yang digunakan. Jalaluddin Rahmat²³ mengidentifikasi tiga kelompok ideologi terkait dengan kemiskinan. *Pertama, konservatisme* yang memandang kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri, yakni malas, boros, fatalis. Tegasnya, kemiskinan bermula dari budaya miskin (*cultur of poverty*). *Kedua, liberalisme* yang menolak pandangan mengenai budaya kemiskinan. Liberalisme memandang bahwa manusia adalah makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah adalah semacam *realistic and situational adaptation* pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan sempit. Orang menjadi miskin karena memiliki posisi yang tidak menguntungkan. *Ketiga, radikalisme* yang lebih menekankan pada peranan struktur sosial, ekonomi, dan politik. Radikalisme memandang bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk

²²Dawam Rahardjo, *Essei-essei Ekonomi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 196.

²³Jalaluddin Rahmat, "Sufisme dan Kemiskinan", dalam Sri Edi Swasono, et.al. (Ed.), *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: dari Cendekiawan Kita tentang Islam*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 24-25.

sosial yang kooperatif, produktif dan kreatif. Orang menjadi miskin karena memang dilestarikan untuk miskin. Kemiskinan dalam pandangan ini memiliki fungsi yang menunjang kepentingan kelompok dominan, *ruling elites* maupun kelas kapitalis. Orang menjadi miskin karena dieksploitasi. Negara-negara terbelakang menjadi miskin karena memang secara berencana dan sistematis dimiskinkan.

Beragamnya pandangan dan teori mengenai akar penyebab kemiskinan sebagaimana telah dijelaskan sesungguhnya telah memperkaya pendekatan dan cara pandang terhadap realitas kemiskinan. Tentu harus diakui bahwa faktor yang menyebabkan kemiskinan bukanlah tunggal. Penyebab kemiskinan, meminjam istilah Henry Sitorus²⁴, tentulah beragam (*multicausal fator*) yang satu sama lain saling berkait. Pola kaitannya disebut oleh Gunnar Myrdal sebagai “*vicious circle*”, yakni suatu lingkaran yang tak berujung pangkal. Sulit dibedakan antara faktor penyebab dan akibat dari kemiskinan. Semua berada dalam proses sirkuler dan kumulatif dimana suatu faktor negatif memainkan dua peranan sekaligus, yakni menjadi penyebab dan sekaligus akibat dari faktor-faktor negatif lainnya.²⁵

Dewasa ini telah terjadi perubahan persepsi mengenai gejala kesalinghubungan antara berbagai persoalan yang tadinya dilihat secara terpisah: antara kemiskinan dan kepincangan sosial dengan sistem kekerasan (*violence*), dominasi dan eksploitasi; antara polusi dan pencemaran lingkungan hidup dengan sistem ekonomi yang ekspansionis; antara pola hubungan ketergantungan pusat pinggiran (*centre-periphery*) dengan sistem teknologi yang mengandung kode ekonomi dan nilai kognitif; antara sistem politik yang represif di Dunia Ketiga dengan order ekonomi internasional yang dikuasai oleh MNC. Semua gejala tersebut berkait satu sama

²⁴Henry Sitorus, “Menelusuri Kausa Ketertinggalan Masyarakat Pantai: Kemiskinan Nelayan Tradisional Sibolga Propinsi Sumatera Utara” dalam M. Arif Nasution, et.al. (Ed.), *Isu-isu Kelautan: dari Kemiskinan hingga Bajak Laut*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1.

²⁵Gunnar Myrdal, *Bangsa-bangsa Kaya dan Miskin*, (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 35-37.

lain dalam suatu hubungan struktural. Masalah keterbelakangan di suatu daerah yang paling terpencil pun telah atau segera akan mempunyai kaitan dengan sistem kapitalisme internasional yang melakukan ekspansi dan penetrasi.²⁶

Sejauh yang telah dipaparkan, maka kita bisa memahami apabila Susan George berkesimpulan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial dan ekonomi; karena adanya sekelompok kecil orang-orang elit yang hidup mewah di atas penderitaan banyak orang. Baik elit dalam negeri maupun pada peranan negara-negara maju yang menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang dan mengeruk keuntungan lewat kolaborasi dengan elit lokal.²⁷ Pandangan terakhir ini tentu menjadi sangat penting untuk kita pertimbangkan dalam melakukan pembacaan terhadap akar kemiskinan di Indonesia.

C. Paradoks Kebijakan Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya, bukan tidak disadari. Analisis kuantitatif yang dilakukan oleh Prof. Amer Al-Roubaie atas kemiskinan di Dunia Muslim dalam hal ini patut disimak. Kemiskinan di Dunia Muslim, demikian Rubaie, secara internal disebabkan faktor-faktor sosial budaya, lingkungan, konflik lokal, faktor agama, ras politik dan ekonomi. Sedangkan faktor eksternalnya, kemiskinan adalah produk dari ketergantungan yang tinggi pada perdagangan, intervensi negara luar, sanksi ekonomi, kekurangan modal, hutang luar negeri, kurangnya kerjasama antar umat Islam, dan ketidakstabilan penghasilan ekspor. Keterbelakangan di negara-negara Muslim juga disebabkan oleh rendahnya produktivitas, salah urus (*mismanagement*), korupsi dan perencanaan yang tidak efektif.²⁸

²⁶Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan...*, h. 28.

²⁷Lihat kembali Jalaluddin Rahmat, "Kunci Surga yang Terbuang" dalam Nabil Subhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, h. 12.

²⁸Amer Al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif", h. 85.

Di antara sebab kemiskinan di negara-negara Muslim dijelaskan oleh laporan kemiskinan Oxfam (*The Oxfam Poverty Report*) sebagai berikut :

“banyak pemerintahan di negara-negara ketiga yang mempunyai budaya kepuasan dengan caranya sendiri. Mereka mempertahankan sistem pemasukan dan distribusi tanah tanpa mengindahkan kaum miskin, mereka berkonsentrasi pada investasi umum di area yang bisa memaksimalkan keuntungan untuk orang-orang kaya dan meminimalisir keuntungan untuk kaum miskin (cetak tebal dari penulis). Dan hampir semuanya juga menghambur-hamburkan dana untuk bisnis persenjataan mereka untuk menciptakan mesin-mesin militer yang sama mengesankannya dengan indikator kesejahteraan masyarakatnya yang mengkhawatirkan”.

Laporan Oxfam ini mengindikasikan bahwa banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah berpihak pada kepentingan orang-orang kaya dan mengabaikan kepentingan orang-orang miskin. Kebijakan mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) seringkali hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat kaya. Di sektor perbankan juga tidak jauh berbeda. Kredit hanya bisa secara leluasa dinikmati oleh orang-orang kaya. Dalam konferensi bertajuk *Big Ideas Conference Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan* pada 23 September 2014, Kepala Perwakilan Bank Dunia Rodrigo A. Chavez mengingatkan kepada pemerintahan SBY bahwa penurunan angka kemiskinan berjalan melambat. Ia menyebutkan bahwa sekitar 68 juta penduduk Indonesia rentan jatuh miskin. Sebab itulah mengentaskan kemiskinan akan menjadi tantangan yang sulit bagi pemerintah yang akan datang.²⁹

Pada tahun 2010, saat periode kepemimpinan Presiden SBY yang kedua, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tindak lanjut dari terbitnya PP ini adalah sebuah lembaga yang kemudian diberi nama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Bencana (TNP2K). Dalam websitenya

²⁹<http://bisnis.liputan6.com/read/2109029/bank-dunia-ingatkan-68-juta-warga-ri-rentan-jatuh-miskin>, akses 14 Oktober 2014.

lembaga ini dibentuk sebagai “wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan”³⁰ Sedangkan tugas pokoknya adalah:³¹

1. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
2. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam menjalankan tugasnya ini, lembaga yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden RI, menjalankan empat strategi dasar, yaitu menyempurnakan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif.³² Dalam prakteknya program-program yang dilakukan seperti listrik murah, perumahan murah, angkutan umum murah, peningkatan kehidupan nelayan dan sebagainya belum menyentuh akar persoalan dari kemiskinan itu sendiri. Lembaga ini memiliki kecenderungan untuk melakukan program-program yang berjangka pendek dan bahkan instan. Artinya mengharapkan lembaga ini akan mampu mengentaskan kemiskinan adalah hal mustahil selama pendekatan yang digunakan sebagaimana yang terjadi selama ini.

Pemerintah perlu menyadari bahwa penciptaan sistem yang dapat membantu kemakmuran dirasakan oleh sebanyak mungkin orang adalah sangat penting. Kemiskinan struktural disebabkan pemerintah lebih “memanjakan” orang-orang yang kaya karena negara dengan itu memang memperoleh hasil yang lebih besar dari mereka, salah satunya dari pajak. Pada tahun 2013, jumlah

³⁰<http://www.tnp2k.go.id/id/mengenai-tnp2k/tentang-tnp2k/>, akses 14 Oktober 2014.

³¹<http://www.tnp2k.go.id/id/mengenai-tnp2k/tentang-tnp2k/>, akses 14 Oktober 2014.

³²<http://www.tnp2k.go.id/id/mengenai-tnp2k/tentang-tnp2k/>, akses 14 Oktober 2014.

orang kaya di Indonesia mencapai 626 orang. Berdasarkan prediksi Konsultan properti Knight Frank, dalam sepuluh tahun yang akan datang jumlah itu akan meningkat sebesar 144% menjadi 1.527 orang. Sedangkan orang super kaya di Indonesia juga diprediksi akan terus meningkat dari jumlah yang ada saat ini.³³

Kenaikan orang-orang kaya Indonesia ternyata tidak sebanding dengan kenaikan kemakmuran bagi orang-orang miskin. Data tahun 2013 dari Bank Indonesia menyatakan bahwa meskipun angka kemiskinan membaik dan orang miskin naik derajat, tetapi kelas menengah lebih cepat dalam menambah akumulasi kekayaan mereka. Hal ini menyebabkan pertumbuhan yang sesungguhnya tidak seimbang. Angka tingkat kesenjangan ekonomi (Rasio Gini) pada tahun 2013 berada dalam kisaran 0,41 persen. Semakin tinggi angka tersebut maka kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin akan semakin lebar. Kesenjangan itu memiliki dampak buruk bagi perkembangan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.³⁴ Hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah adalah kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi di Jawa dan luar Jawa. Laporan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2014 mencatatkan pertumbuhan 5,12 persen, pulau Jawa masih mendominasi dalam pembangunan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar sebesar 58,70 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,74 persen, Pulau Kalimantan 8,31 persen, Pulau Sulawesi 4,84 persen, dan sisanya 4,41 persen di pulau-pulau lainnya.³⁵

Hambatan lain adalah korupsi yang mengakar di Indonesia. Hingga tahun 2013 Transparency International mencatat Indonesia masih berada dalam peringkat 114 dari 177 negara dengan skor yang sama dengan tahun 2012, yakni 32. Meskipun naik empat

³³<http://finance.detik.com/read/2014/03/20/205854/2532273/1016/jumlah-orang-kaya-di-indonesia-akan-melonjak-144-dalam-10-tahun>, akses 14 Oktober 2014.

³⁴<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/18/1929283/Ketimpangan.Ekonomi.di.Indonesia.Makin.Menganga>, akses 14 Oktober 2014.

³⁵Baca Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No. 63/08/Th. XVII, 5 Agustus 2014.

peringkat tetapi skor yang sama menunjukkan korupsi masih menggurita di negeri ini. Bahkan per 31 Agustus 2014 angka pelaku korupsi yang ditangani oleh KPK sudah berada dalam angka 35. Tabulasi data pelaku korupsi dapat dilihat berikut ini.³⁶

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	2	75
Kepala Lembaga/ Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	8	19
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	1	11
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	7	40
Eselon I / II / III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	1	115
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	9	103
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	5	45
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	35	429

Sumber: kpk.go.id

Angka ini tentu bukanlah angka sesungguhnya karena korupsi adalah sebuah fenomena gunung es. Jika permukaan yang tampak telah menghasilkan kerugian yang besar terhadap negara, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi yang terdapat dalam struktur birokrasi negara akan memangkas setiap potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk memangkas kemiskinan. Ada banyak contoh buruk bagaimana praktek suap telah menenggelamkan aturan yang adil dan berpihak rakyat. Suap mewabah pada semua proyek-proyek raksasa. Menjadi pejabat yang punya wewenang mengeluarkan ijin, pendapatannya sama dengan menjadi jutawan. Salah urus (*miss-management*) negara dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat banyak ini melahirkan implikasi yang sangat mencengangkan.

³⁶<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>, akses 14 Oktober 2014.

D. Penutup

Sebuah Temu Nasional Penanggulangan Kemiskinan pernah diadakan hampir satu dekade lalu, tepatnya tanggal 12-13 Oktober 2005 di Hotel Millenium Jakarta. Meskipun seminar itu sudah lama sekali, tetapi rekomendasi yang dihasilkan masih sangat relevan dengan kondisi hari ini. Temu Nasional itu diadakan dalam rangka peluncuran dan sosialisasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), Deklarasi Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Krisis BBM melalui penanaman jarak pagar, dan peringatan Hari Internasional Pengurangan Resiko Bencana.

Rumusan butir-butir kesepakatan itu adalah: *Pertama*, perlu kejujuran dari pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mengakui bahwa kebijakan yang ada selama ini kurang tepat dalam menanggulangi kemiskinan. *Kedua*, untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan kepemimpinan yang memihak rakyat, serta komitmen dan *political will* dalam hal: 1) anggaran yang memihak kepada masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, 2) Prioritas kebijakan yang jelas dan terukur, 3) pelaksanaan kebijakan yang konsisten dengan pengawasan dan pengendalian serta sanksi yang tegas, 4) kelembagaan yang kokoh, 5) kemitraan pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

Sebagaimana yang dihasilkan dari ruang-ruang pertemuan, seminar dan diskusi pada umumnya, rumusan ini memang bagus sekaligus ideal, tetapi yang ideal selalu tidak mudah dilihat pada realitasnya karena terbukti tahun ini butiran rumusan itu belum mampu mengentaskan kemiskinan, tetapi memang tak ada cara lain bahwa perlu ada kerja keras yang terus menerus untuk menangani kemiskinan demi kehidupan bangsa yang sejahtera dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Roubaie, Amer, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif" dalam *Islamia*, Vol II No. 3, Desember 2005.
- Ath-Thawil, Nabil Subhi, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, Trj. Muhammad Bagir, Bandung: Mizan, 1985.
- Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No. 63/08/Th. XVII, 5 Agustus 2014.
- Galbraith, John Kenneth. *Hakikat Kemiskinan Massa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Gunnar Myrdal, *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*, diringkas oleh Seth. S. King, Great Britain: Allen Lane The Penguin Press, 1977.
- McClelland, David C., "Dorongan Hati Menuju Modernisasi", dalam Myron Weiner (Ed.), *Modernisasi, Dinamika, Pertumbuhan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980.
- Mulder, Neils. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984.
- Myrdal, Gunnar. *Bangsa-bangsa Kaya dan Miskin*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Rahardjo, Dawam. *Essei-essei Ekonomi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Rahmat, Jalaluddin "Kunci Surga yang Terbuang" dalam Nabil Subhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, Trj. Muhammad Bagir, Bandung: Mizan, 1985.
- _____, "Sufisme dan Kemiskinan", dalam Sri Edi Swasono, et.al. (Ed.), *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: dari Cendekiawan Kita tentang Islam*, Jakarta: UI Press, 1987.

Sanusi, Ahmad, *Agama di Tengah Kemiskinan: Refleksi atas Pandangan Islam dan Kristen dalam Perspektif Kerjasama antar Umat Beragama*, Jakarta: Logos, 1999.

Sinaga, Rudolf S. dan Benyamin White, "Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Struktural" dalam Alfian, et.al. (Ed.), *Kemiskinan Struktural*, Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980.

Sitorus, Henry. "Menelusuri Kausa Ketertinggalan Masyarakat Pantai: Kemiskinan Nelayan Tradisional Sibolga Propinsi Sumatera Utara" dalam M. Arif Nasution, et.al. (Ed.), *Isu Kelautan: dari Kemiskinan hingga Bajak Laut*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sumardjan, Selo, "Kemiskinan Struktural dan Pembangunan" dalam Alfian, et.al. (Ed.), *Kemiskinan Struktural*, Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980.

Suparlan, Parsudi (Ed.), *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

Suseno, Frans Magnis. "Keadilan dan Analisis Sosial: Segi-segi Etis" dalam J.B. Banawiratman, SJ. (Ed.) *Kemiskinan dan Pembebasan*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Kompas, 28 Mei 2005.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2109029/bank-dunia-ingatkan-68-juta-warga-ri-rentan-jatuh-miskin>.

<http://www.tnp2k.go.id/id/mengenai-tnp2k/tentang-tnp2k/>.

<http://www.tnp2k.go.id/id/mengenai-tnp2k/tentang-tnp2k/>.

<http://www.tnp2k.go.id/id/mengenai-tnp2k/tentang-tnp2k/>.

<http://finance.detik.com/read/2014/03/20/205854/2532273/1016/jumlah-orang-kaya-di-indonesia-akan-melonjak-144-dalam-10-tahun>.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/02/18/1929283/Ketimpangan.Ekonomi.di.Indonesia.Makin.Menganga>.

<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>.

http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=7.

http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=7, akses 13 Oktober 2014.